



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
ASOSIASI PENYELENGGARA INTERNET INDONESIA (APJII)
Nomor : 567/UNWAR/PD-15/2022
Nomor : MOU/APJII-BALI/DPS/III/001/2022
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI,
GUNA PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.**

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (1-4-2022) bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp., ParK**, Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- II. **Ryan Soma, S.Si, SH, MH, CLA**, Ketua Pengurus Wilayah APJII Bali, bertindak untuk dan atas nama APJII Bali yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Barat No.333, Br.Pagutan, Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing – masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing–masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun pembangunan serta pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini, untuk meningkatkan pelaksanaan program–program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, pembelajaran, seminar, kajian–kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

1

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Bidang Pendidikan/Pengajaran
- 2) Bidang Penelitian
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK

Pasal 3

Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pelatihan / peningkatan Kompetensi tenaga pendidik (dosen), penugasan tenaga pendidik, kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- 2) Magang / Pelatihan / Kerjasama peningkatan Kompetensi mahasiswa;
- 3) Konsultasi pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk Lembaga maupun pengabdian masyarakat
- 4) Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- 1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing–masing PIHAK;
- 2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program - program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing–masing PIHAK
- 3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Pelaksanaan / Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat, berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar kesepahaman PARA PIHAK;
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E Sp. Park

PIHAK KEDUA,



Ryan Soma, S.Si, SH, MH, CLA